

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ackerman, Bruce. *Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism*. New Haven: Yale University Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Dua Belas Prinsip Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen*. Jakarta: Konstitusi Press, 2007.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Bangun, Zakaria. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945: Konstitusi dan Babakan Konstitusi Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Bennet, Jonathan, ed. *Second Treatise of Government*, by John Locke. 2008.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885.
- Dyzenhaus, David. *The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Ghoffar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana prenatal media group, 2009.
- Gross, Oren, dan Fionnuala Ní Aoláin. *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

- Hamidi, Jazim. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi DPR*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mahfud MD, Mohammad. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Montesquieu. *L'Esprit des Lois*. Genève: Barrillot & Fils, 1748.
- Pasaribu, Alboin. *Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara dalam Keadaan Darurat*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlaku) DPR RI. *Resume Pengujian Formil/Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: DPR RI.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara." Materi Pembelajaran MKRI, 2015.
- Schmitt, Carl. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Translated by George Schwab. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Stahl, Friedrich Julius. *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: J.C.B. Mohr, 1930.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)*. Malang: UMM Press, 2003.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Vile, M. J. C. *Constitutionalism and the Separation of Powers*. 2nd ed. Indianapolis: Liberty Fund, 1998.

B. Jurnal:

- Adnan, Muhammad Rifky. “Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Kajian Konstitusional Pasca Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 490.
- Amsari, Feri. “Analisis terhadap Perppu Kebijakan Keuangan Negara.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 412.
- Anggono, Bayu Dwi. “Kritik Terhadap Perppu Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022).
- Asrul. “Tafsir Kegentingan Yang Memaksa Dalam Perppu.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019).
- Bachmid, Fahri. “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Reformasi* 13 (2023): 195–203.
- Fudika, Moza Dela, Aryo Akbar, dan Asri Muhammad Saleh. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Menakar Negara Berada dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa oleh Presiden.” *Panorama Hukum* 7 (2022): 100–109.
- Hikmawati, Puteri. “Menimbang Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.” *Info Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 15, no. 1 (January 2023).
- Hsb, Ali Marwan. “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law).” *Legislasi Indonesia* 14 (2017).
- Ibrahim, Rein Devrizal, dan Fence M. Wantu. “Eksistensi Ikhwal Kegentingan yang Memaksa dalam Perppu Ketika Ditetapkan Menjadi Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2023): 15–24.
- Marwan Hsb, Ali. “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Legislasi Indonesia* 14 (2017).

- Mujaddidi, Sipghotulloh. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 540–604.
- Nasarudin, Tubagus M., dan Anggun Sari. “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.” *JHM (Jurnal Hukum Malahayati)* 3, no. 1 (April 2022).
- Nuh, Muhammad Syarif. “Hakikat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah.” *Jurnal Hukum* 18 (2011): 229–246.
- Octovina, Ribkha Annisa. “Sistem Presidensial di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (October 2018): 247–251.
- Prasetyaningsih, Rahayu. “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2017): 263–280.
- Pratiwi, Dian Kus. “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Prayitno, Cipto. “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).
- Purnomo, Chrisdianto Eko. “Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan yang Memaksa.” *Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Riyadi, B. “Montesquieu dan Trias Politika.” *Jurnal Hukum Prisma* 15, no. 2 (2019).
- Saidi, Faisal, dan Siti Fatimah. “Enigma Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (June 2023).
- Salman, Radian. “Sifat Kerugian Konstitusional dalam Judicial Review di MK.” *Jurnal Konstitusi* 5, no. 1 (June 2008): 117.

- Setiadi, Wicipto. “Mekanisme Pengawasan DPR terhadap Penerbitan Perppu oleh Presiden: Upaya Menjaga Prinsip Check and Balances dalam Hukum Tata Negara Darurat.” *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 4 (2025): 16–27.
- Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan yang Memaksa’ dalam Penerbitan Perppu.” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 58–70.
- Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 348–350.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sujatmiko, Eko. “Dinamika Kewenangan Presiden dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Konstitusional* 10, no. 1 (2021): 45.
- Syahuri, Taufiqurrahman, dan Rianda Dirkareshza. “Pembatasan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Perppu: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.” *Jurnal Komisi Yudisial* 16, no. 3 (December 2023): 402–418.
- Yohanes Suhardin, dan Henny Saida Flora. “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (May 18, 2023): 76–91.
- Yustiyanto, Reza. “Diskresi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.” *Jurnal Restorasi Hukum*, February 7, 2022: 32.

C. Skripsi, disertasi dan tesis:

- Ainun, Salsabila Nadia. “Perihal Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK oleh Presiden).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Annamir, Havez. *Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Perppu (Studi Penetapan Perppu Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009)*. Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

Azhara, Mayang Devi. "Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009." Skripsi, Universitas Indonesia, 2022.

Irawan, Candra Dwi. *Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Irham, Muhammad. "Legalitas Pembentukan Peraturan Presiden oleh Presiden Ditinjau dari Sumber Kewenangan (Atribusi, Mandat, Delegasi)." Skripsi, Universitas Pattimura, November 7, 2016.

D. Media online/Website:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia." JDIH Kementerian Keuangan RI. Diakses 3 Januari 2026.

<https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/1945/UUDTAHUN~1945UUDPenj.htm>

LexisNexis. "Ratio Decidendi." <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/ratio-decidendi>. Diakses pada January 25, 2026.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. "Mengenal Apa Itu Asas Contrarius Actus." <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-apa-itu-asas-contrarius-actus>. Diakses pada February 2, 2026.

Pusat Analisis Keparlemen DPR RI. "Legislative Review terhadap Perppu dalam Perspektif Fungsi Pengawasan DPR." <https://puspanlakuu.dpr.go.id>. Diakses pada January 18, 2026.

Raditya, Iswara N. "Amandemen UUD 1945: Sejarah & Isi Perubahan Ketiga Tahun 2001." *Tirto*, October 14, 2019. <https://tirto.id/amandemen-uud-1945-sejarah-isi-perubahan-ketiga-tahun-2001-ejHB>. Diakses pada January 3, 2026.

Rahmi, Novrieza. "Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan 'Cermin' Subjektivitas Presiden." *Hukumonline*, September 2, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-munculnya-istilah-perppu->

- [dan-cermin-subjektivitas-presiden-lt59a860340566c/](https://www.lsf-discourse.org/state-of-exception-dan-urgensi-hukum-tata-negara-darurat/). Diakses pada January 16, 2026.
- Ramadhan, Rakha. “State of Exception dan Urgensi Hukum Tata Negara Darurat.” *LSF Discourse*. <https://lsfdiscourse.org/state-of-exception-dan-urgensi-hukum-tata-negara-darurat/>. Diakses pada January 5, 2026.
- Rizqo, Kanavino Ahmad. “Penggugat UU Cipta Kerja di MK Kritik Penerbitan Perppu.” *Detik News*, December 30, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6489483/penggugat-uu-cipta-kerja-di-mk-kritik-penerbitan-perppu>. Diakses pada February 3, 2026.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi COVID-19.” April 1, 2020. <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/>. Diakses pada February 3, 2026.
- Thea DA, Ady. “Putusan MK Harusnya Jadi Parameter Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja.” *Hukumonline*, 5 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-harusnya-jadi-parameter-presiden-terbitkan-perppu-cipta-kerja-lt63b6a1eade0c9/>
- Wahid, Hidayat Nur. “Kritik Perppu Cipta Kerja, HNW: Seharusnya Presiden Laksanakan Putusan MK, Bukan Malah Membuat Perppu yang Dinilai Abaikan MK.” February 2, 2023. <https://mpr.go.id/berita/Kritik-Perppu-Cipta-Kerja%2C-HNW%3A-Seharusnya-Presiden-Laksanakan-Putusan-MK%2C-Bukan-Malah-Membuat-Perppu-yg-Dinilai-Abaikan-MK>. Diakses pada February 3, 2026.
- Wahyuni, Willia. “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu.” *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuasaan-presiden-dalam-mengeluarkan-perppu-lt63b290d82671d/>. Diakses pada November 19, 2025.
- Yasin, Muhammad. “Antara Definisi dan Praktik Rule of Law di Indonesia.” *Hukumonline*, April 23, 2021. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60817afb8bde0/>. Diakses pada January 3, 2026.

Zoelva, Hamdan. "Konsekuensi Implementasi HAM dalam UUD 1945." February 18, 2008. <https://zoelvapartners.id/konsekuensi-implementasi-ham-dalam-uud-1945/>. Diakses pada January 10, 2026.

E. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.*

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan MK Nomor 001/PUU-IV/2006 tentang Negara Hukum.

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan MK Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pentingnya prosedur pembentukan undang-undang sebagai bagian dari konstusionalitas formal.